

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Masalah ekonomi selalu adalah masalah yang selalu menyita perhatian sebagian besar orang atau masyarakat, berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah ekonomi, terutama masalah kemiskinan dan hampir di setiap pergantian presiden hal ini selalu menjadi topik yang paling sering di bahas, namun kenyataannya kesejahteraan masih minim terjadi, atau dengan kata lain tingkat kemiskinan terus bertambah. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang terjadi di Indonesia, meskipun sudah memasuki era globalisasi namun masalah tersebut selalu menjadi faktor penghambat kemajuan Indonesia. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, keadaan geografis, dan lokasi dari lingkungan. (Kusumaputra, 2017).

Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan salah satunya yakni dengan memberikan keleluasaan terhadap pemerintahan terkecil yakni desa untuk mengelola desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada atau disebut dengan otonomi desa. Menurut (Kusumaputra, 2017) munculnya UU No. 6 Tahun 2014 sebagai salah satu langkah pemerintah untuk semakin memaksimalnya peran desa melalui otonomi desa. Keberadaan desa seharusnya mampu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan nasional, terutama pada

bidang ekonomi. Hal ini mengingat bahwa secara historis, desa mempunyai kemampuan untuk mandiri dalam melakukan pengelolaan desa. Apalagi setiap desa mempunyai potensi yang khas, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nilai nilai yang hidup di masyarakat desa juga mampu membawa desa sebagai suatu komunitas yang maju. Tentunya untuk menciptakan kondisi yang demikian itu, perlu adanya pembinaan dari berbagai elemen, misalnya melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Melihat masalah ekonomi yang ada dan keleluasaan desa mengelola perekonomiannya sendiri atau disebut otonomi desa maka salah satu strategi yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan optimaslisasi sumber daya yang dimiliki oleh desa adalah dengan membentuk lembaga yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. (Fauzan & Rusdiyanti, 2022). Pembentukan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Lahirnya BUMDes diharapkan mampu menjadi lembaga yang akan menampung kegiatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat desa, bahkan lebih dari itu, BUMDesa diharapkan akan menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni suatu badan usaha yang dimiliki desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) dibentuk kebutuhan dan juga potensi yang dimiliki desa, selain itu BUMDes juga menjadi alat pendorong kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga sosial serta komersial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam menyediakan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai komersial memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar (Nuraini, 2021).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya mensejahterakan masyarakat desa. (Wijaya, 2021). Berdasarkan peraturan pemerintah desa tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes merupakan organisasi atau lembaga publik yang melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk atas persetujuan Bersama masyarakat desa dan pemerintah desa secara formal dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Badan Usaha Milik Desa dapat berperan dalam pengembangan, kelembagaan, dan pengelolaan usaha masyarakat dan akhirnya dapat membawa perubahan pada bidang ekonomi dan sosial di desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 87 Ayat 1 yang berbunyi, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut (BUMDes), Ayat 2 yang berbunyi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan semangat

kekeluargaan dan gotong royong, dan Ayat 3 yang berbunyi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Agustiawati et al., 2022).

Tahun 2020 merupakan awal mula kemunculan virus *covid-19* di Indonesia, kemunculan *covid-19* ini dibarengi dengan penyebaran virus yang meluas, selain memengaruhi kehidupan dan kesehatan manusia, pandemi *covid-19* juga berdampak pada perekonomian hampir di semua sektor. Pandemi *covid-19* berdampak pada sejumlah sektor usaha sehingga menyebabkan kemerosotan yang melumpuhkan ekonomi nasional dan global. Kegiatan ekonomi Indonesia bisa terganggu jika terjadi pandemi. Pandemi memiliki dampak, antara lain penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4% atau kurang, tergantung berapa lama pandemi berlangsung dan seberapa parah penyebarannya, memengaruhi atau bahkan menghentikan kegiatan ekonomi dan masyarakat. (Ridwan et al., 2022).

Meningkatnya perkembangan *covid-19* di Indonesia membuat pemerintah mengambil berbagai macam kebijakan pada Selasa, 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan pengobatan penanggulangan penyakit virus corona (*covid-19*) mengatur aspek teknis pelaksanaannya di masa pandemi. Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang melarang masyarakat untuk mengikuti kegiatan atau berkumpul bersama. (Raharti &

Ridwan, 2021). Dampak yang dirasakan masyarakat oleh adanya pandemi *covid-19* adalah penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar tetapi usaha kecil maupun menengah, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga mengalami penurunan perekonomian. Penurunan perekonomian ini terjadi karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang kemudian sangat berpengaruh kedalam pengelolaan kinerja keuangan BUMDes itu sendiri.

Kabupaten Jembrana adalah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana terletak di ujung barat pulau Bali, secara administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo, dan Pekutatan. Dari lima kecamatan yang tersebar di Kabupaten Jembrana tercatat ada 41 desa, sebagai wujud pelaksanaan pembangunan desa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan optimaslisasi sumber daya yang dimiliki oleh desa salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka pemerintah Kabupaten Jembrana dengan 41 desa yang dimilikinya masing-masing sudah mempunyai BUMDes. Data ini diperoleh dari website <https://statistiksektoral.jembranakab.go.id/> pada tahun 2022 yang menyatakan terdapat 41 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jembrana



Gambar 1.1

Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Jembrana

(Sumber : <https://statistiksektoral.jembranakab.go.id/>, 2022.)

Berdasarkan data atau gambar 1.1, dapat dilihat persebaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jembrana, yang terdiri dari lima kecamatan yang masing-masing memiliki BUMDes, yakni Kecamatan Pekutatan memiliki 8 BUMDes, Mendoyo 10 BUMDes, Jembrana 6 BUMDes, Negara 8 BUMDes dan Melaya 9 BUMDes, dengan jumlah total BUMDes yang ada yakni sebanyak 41 BUMDes. BUMDes yang ada di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Jembrana

N0	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan	Usaha	Juamlah Usaha
1	BUMDes Panca Danarta Mandiri	Pengeragoan	Pekutatan	SP, Jasa Samsat, Jasa BRI Link, Dagang, Rumah Makan	5
2	BUMDes Catu Graha Mandiri	Gumrih	Pekutatan	SP, Dagang, Jasa	3

N0	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan	Usaha	Jumlah Usaha
3	BUMDes Dwi Buana Amertha	Pangyangan	Pekutatan	SP, Air, Dagang	3
4	BUMDes Tri Mandala Sari	Manggisari	Pekutatan	SP, Jasa	2
5	BUMDes Catur Amertha Sedana	Asahduren	Pekutatan	SP, Dagang	2
6	BUMDes Cipta Maha Dana	Pekutatan	Pekutatan	SP, Dagang, Pariwisata, Bank Sampah	4
7	BUMDes Tri Buana	Pulukan	Pekutatan	SP, Dagang, Jasa	3
8	BUMDes Dwi Lestari	Medewi	Pekutatan	SP, Dagang	2
9	BUMDes Tirta Rahayu	Yehsumbul	Mendoyo	SP, Dagang, sewa (futsal)	3
10	BUMDes Abdi Rahayu	Yehembang Kangin	Mendoyo	Air, Dagang, Jasa samsat, AMDK	4
11	BUMDes Abdi Luwih	Yehembang	Mendoyo	SP, Pasar Senggol	2
12	BUMDes Sri Sedana	Yehembang Kauh	Mendoyo	SP, Dagang, Jasa Samsat	3
13	BUMDes Amerta Buana	Penyaringan	Mendoyo	Dagang, Jasa Samsat	2
14	BUMDes Catur Sejahtera Lestari	Mendoyo Dangin Tukad	Mendoyo	Dagang	1
15	BUMDes Sad Anyana Tunggal	Mendoyo Dauh Tukad	Mendoyo	SP, Dagang, Peternakan Kambing	3
16	BUMDes Tunjung Mekar	Dlod Berawah	Mendoyo	SP, Dagang	2
17	BUMDes Graha Sedana	Pergung	Mendoyo	Dagang	1
18	BUMDes Buana Kerta	Pohsanten	Mendoyo	Dagang	1
19	BUMDes Karya Bhakti	Batu Agung	Jembrana	SP, Dagang	2

N0	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan	Usaha	Jumlah Usaha
20	BUMDes Karya Usaha Bhakti	Budeng	Jembrana	SP, Dagang, Jasa Sewa	3
21	BUMDes Pahlawan	Air Kuning	Jembrana	SP, Dagang	2
22	BUMDes Sari Sedana	Perancak	Jembrana	SP, Dagang, Wisata	3
23	BUMDes Amertha Bhuana	Yeh Kuning	Jembrana	SP, Dagang, Kuliner	3
24	BUMDes Mulla Sedana	Dangin Tukadaya	Jembrana	SP, Dagang	2
25	BUMDes Ksama Artha	Kaliakah	Negara	SP, Dagang	2
26	BUMDes Cahaya Baru	Cupel	Negara	Dagang, Mengelola Sampah	2
27	BUMDes Catur Aiswara	Banyubiru	Negara	SP, Dagang	2
28	BUMDes Amerta Jati	Brangbang	Negara	SP, Dagang, Air Bersih	3
29	BUMDes Fajar Samudra	Pengambangan	Negara	SP, Dagang, Kuliner	3
30	BUMDes Partha Jaya	Tegal Badeng Timur	Negara	SP, Dagang, Jasa Samsat	3
31	BUMDes Bina Warga	Tegal Badeng Barat	Negara	SP, Dagang, Jasa	3
32	BUMDes Rama Sinta	Baluk	Negara	SP, Dagang, Sewa, Mengelola Sampah	4
33	BUMDes Maju Jaya	Manistutu	Melaya	SP, Dagang	2
34	BUMDes Karya Sejahtera	Tukadaya	Melaya	SP, Air	2
35	BUMDes Karya Bakti	Candikusuma	Melaya	SP, Dagang, Jasa Samsat, Jasa Fc	4
36	BUMDes Artha Karya Sari	Nusasari	Melaya	SP, Jasa Samsat, Jasa FC, Bank Sampah	4



N0	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan	Usaha	Jumlah Usaha
37	BUMDes Artha Wedhiguna	Tuwed	Melaya	SP, Dagang, Jasa Samsat, Jasa BRILink	4
38	BUMDes Eka Bhuana Santhi	Ekasari	Melaya	SP, Dagang, Jasa Samsat	3
39	BUMDes Sari Sejahtera	Blimbingsari	Melaya	SP, Dagang, Air	3
40	BUMDes Bina Sejahtera	Melaya	Melaya	SP, Dagang, Jasa Samsat	3
41	BUMDes Karya Lestari	Warnasari	Melaya	SP, Dagang, Jasa Samsat, Air	3

(Sumber: Data Bumdes Kabupaten Jembrana tahun 2022)

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa BUMDes Panca Danarta Mandiri merupakan BUMDes yang memiliki unit usaha terbanyak di Kabupaten Jembrana, dengan jumlah unit usaha sebanyak lima unit. BUMDes ini terletak di Desa Pengeragoan yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pekutatana. Kecamatan Pekutatana merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Buleleng. Kecamatan Pekutatana terdiri dari 8 desa yakni antara lain Desa Pengeragoan, Desa Gumrih, Desa Panyangan, Desa Pekutatana, Desa Asahduren, Desa Mnaggis Sari, Desa Pulukan, dan Desa Medewi. Dari 8 desa ini kemudian memiliki 8 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panca Danarta Mandiri yang dimiliki oleh Desa Pengeragoan terbentuk pada tahun 2006. Pada awal berdirinya (BUMDes) Panca Danarta Mandiri, keanggotaan atau struktur anggota yang dimiliki BUMDes ini masih merangkap jabatan sebagai

perangkat desa. Pada tahun 2017 struktur keanggotaan BUMDes Panca Danarta Mandiri mulai diubah, dengan keanggotaan yang bukan lagi menrangkap jabatan sebagai perangkat desa. Mulai tahun 2017 perkembangan BUMDes Panca Danarta dimulai, hal ini dapat dilihat dari banyaknya unit usaha yang dimilikinya yang menjadikan BUMDes ini sebagai salah satu BUMDes dengan unit usaha terbanyak di Kecamatan Pekutatan yang mencapai 5 unit usaha yang diantaranya adalah Simpan pinjam, jasa samsat, jasa *BRI Link*, dagang, dan rumah makan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 April 2024 dengan direktur BUMDes Panca Danarta Mandiri, I Wayan Golik Lampika Putra mengatakan bahwa:

(BUMDes Panca Danarta Mandiri dalam operasinya mempunyai 5 unit usaha yang mulai dibentuk pada tahun 2017, ada usaha simpan pinjam yang di bangun tahun 2017, unit jasa samsat yang dibangun tahun 2018, unit dagang dan unit rumah makan di tahun 2019 dan unit jasa *BRI Link* yang dibangun tahun 2021)

Melihat pernyataan tersebut diketahui Badan Usaha Milik Desa Panca Danarta Mandiri mengawali perkembangannya pada tahun 2017 dimana, unit usaha yang pertama kali terbentuk yakni unit simpan pinjam, unit usaha ini memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada UMKM ataupun masyarakat Desa Pengeragoan khususnya pada bidang permodalan. Pada tahun 2018 terbentuklah unit usaha baru yakni jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor atau jasa samsat, usaha ini bekerja sama dengan pihak terkait guna untuk membantu masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis. Pada tahun 2019 BUMDes Panca Danarta Mandiri Kembali manambah unit usahanya yakni unit usaha rumah makan dan unit

usaha dagang atau toko grosir, dimana unit rumah makan ini adalah unit usaha yang berada di kawasan wisata desa. Sedangkan unit usaha dagang atau unit toko grosir yakni unit usaha yang menjual berbagai kebutuhan seperti sembako dan kebutuhan pertanian. Pada tahun 2021 muncul unit baru yang bergerak di bidang jasa yakni unit *BRI Link*, unit usaha ini bekerja sama dengan *Bank BRI*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan direktur BUMDes Panca Danarta Mandiri, I Wayan Golik Lampika Putra, beliau mengatakan bahwa :

(Dari kelima unit bumdes itu dibagi kedalam 4 divisi unit yakni unit simpan pinjam, unit usaha dagang, unit usaha pariwisata atau unit rumah makan, dan unit jasa yang terdiri dari jasa samsat dan jasa *BRI Link*. Keempat divisi masing-masing mempunyai manajer unit, kemudian keuntungan dari masing-masing unit di gabungkan).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kelima unit usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panca Danarta Mandiri yakni unit simpan pinjam, unit samsat, unit rumah makan, unit toko grosir, dan unit *BRI Link* dikelompokkan menjadi 4 divisi unit usaha yakni: 1) unit usaha simpan pinjam, 2) unit usaha dagang, 3) unit usaha pariwisata (yang didalamnya unit rumah makan), dan 4) unit usaha jasa (yang di dalamnya ada unit jasa samsat dan jasa *BRI Link*) yang semua divisi unit usaha ini memiliki seorang manajer yang nantinya bertanggung jawab atas masing-masing unit yang ada, serta bertanggung jawab pula terhadap kendala yang ada pada unit yang dipimpinnya.

Dalam pertumbuhan suatu bisnis selalu muncul suatu permasalahan yang biasanya dialami oleh bisnis tersebut. Masalah keuangan adalah hal yang biasanya muncul dalam beberapa bisnis. Terkadang dengan hanya melihat laporan keuangan perusahaan yang dibuat setiap periode dapat dinilai bahwa perusahaan tersebut sedang bermasalah atau tidak. Dengan begitu, kinerja keuangan dapat dievaluasi lebih dalam dengan menganalisis laporan keuangan. Dalam menjalankan usaha bisnis diperlukan penilaian seberapa sehat atau efektif keuangan yang ada dalam perusahaan. Analisis laporan keuangan biasanya dilakukan oleh akuntan perusahaan pada akhir periode. (Pebriyanti et al., 2017).

I Gede Candra Wirawan selaku bendahara BUMDes Panca Danarta Mandiri dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada 16 April 2024, memaparkan kendala yang dihadapi pasca pandemi covid-19, yakni sebagai berikut:

(kendala yang kami alami saat ini di setiap unit seperti pada unit simpan pinjam banyak menunggak atau terlambat membayar kredit yang kurang lebih jumlahnya mencapai Rp.106,000,000, pada unit dagang karena disini kita kan mayoritas petani ya, mungkin kendalanya alat pertanian yang dijual masih kurang lengkap, dan juga adanya alat yang rusak seperti mesin *fotocopy* dan *printer*. Pada unit jasa *BRI Link* juga terkendala informasi, dimana masih sedikit masyarakat yang tahu unit ini sehingga pada tahun kemarin kami mengalami penurunan pendapatan).

BUMDes Panca Danarta Mandiri dalam menjalankan unit usaha pasca pandemi *covid-19* mengalami beberapa kendala, kendala yang dihadapi unit usaha BUMDes Panca Danarta Mandiri antara lain pada unit usaha simpan pinjam BUMDes Panca Danarta Mandiri mengalami kendala karena banyaknya kredit macet yang mempengaruhi kinerja keuangan yang ada,

kendala juga dialami pada unit dagang dimana kurangnya inovasi barang dagang serta rusaknya beberapa alat seperti *printer* dan mesin *fotocopy*. Pada unit jasa tepatnya pada unit jasa *BRI Link* kendala juga dialami, dimana kendala yang dialami unit ini yakni kurangnya sosialisasi tentang keberadaan unit jasa *BRI Link* kepada masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pendapatan unit ini. Kendala- kendala yang ada di masing-masing unit pada BUMDes Panca Danarta Mandiri ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan unit yang ada, maka dari itu perlu dilakukan analisis laporan keuangan yang ada.

I Gede Candra Wirawan selaku bendahara BUMDes Panca Danarta Mandiri juga memaparkan bahwa:

(Pada tahun 2022-2023 kami mengalami penurunan laba pada unit usaha jasa yang pada awalnya yakni pada tahun 2021 laba dari unit usaha ini sebesar Rp. 6.587.500 kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi Rp. 5.794.000 dan di tahun selanjutnya yakni tahun 2023 laba usaha unit ini kembali menurun menjadi Rp. 4.341.173.)

BUMDes Panca Danarta Mandiri dalam menjalankan unit usaha jasa yakni ada jasa samsat dan jasa *BRI Link* tercatat mengalami penurunan laba usaha dari tahun 2022-2023 hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pelanggan atau kurangnya konsumen. Berdasarkan kendala yang ada serta adanya penurunan laba usaha dari salah satu unit usaha yang ada pada BUMDes Panca Danarta Mandiri pasca pandemi *covid 19 ini* secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada unit yang ada, maka dari itu perlu dilakukan analisis laporan keuangan, guna untuk melihat

kondisi kinerja keuangan dari unit usaha pada BUMDes Panca Danarta Mandiri.

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang di capai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan atau instansi. (Dharma et al., 2023). Kinerja keuangan merupakan gambaran suatu kondisi keuangan pada perusahaan di suatu periode yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana dengan melihat beberapa indikator yang mempengaruhinya, yakni kecukupan modal, profitabilitas, dan liquiditas. (Khairunnisa et al., 2023). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan sangat berguna untuk melihat perkembangan dari suatu badan usaha yang sedang beroperasi, pemerintah juga dapat mengukur tingkat baik atau buruknya kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan Usaha Milik Desa berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan yang dilakukan.

Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan terdiri dari beberapa rasio antara lain: 1) rasio liquiditas, yaitu analisis yang digunakan oleh entitas atau perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. 2) rasio solvabilitas, yaitu analisis yang digunakan oleh entitas atau perusahaan untuk mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana utang atau pinjaman. 3) rasio profitabilitas, yaitu analisis yang digunakan oleh entitas atau perusahaan untuk

memperoleh keuntungan dari penggunaan modal. 4) rasio aktivitas, yaitu analisis yang digunakan oleh entitas atau perusahaan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), nantinya berguna untuk mengetahui kinerja dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang ada serta banyaknya unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Panca Danarta Mandiri maka peneliti berkeinginan untuk meneliti kinerja keuangan di masing-masing unit usaha BUMDes Panca Danarta Mandiri dengan menggunakan analisis rasio keuangan, berupa rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa Panca Danarta Mandiri Pasca Pandemi Covid-19**

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Identifikasi masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Adanya unit usaha pada BUMDes Panca Danarta Mandiri yang mengalami penurunan laba usaha pasca pandemi *covid 19*.
2. Adanya sejumlah kendala yang dialami beberapa unit usaha BUMDes Panca Danarta Mandiri pasca pandemi *covid 19*.
3. Tidak adanya analisis terhadap laporan keuangan yang menunjukkan kondisi kinerja keuangan masing – masing unit usaha BUMDes Panca Danarta Mandiri.

### 1.3. PEMBATASAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan pada masing – masing unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Panca Danarta Mandiri pasca pandemi *Covid-19* yang di tinjau dengan menggunakan beberapa Rasio keuangan, yakni rasio liquiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas.

### 1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pada Masing – Masing Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Panca Danarta Mandiri pasca pandemi *Covid-19*?

### 1.5. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pada Masing – Masing Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Panca Danarta Mandiri pasca pandemi *Covid-19*

### 1.6. MANFAAT PENELEITIAN

Dengan adanya penelitan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak-pihak berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai analisi kinerja keuangan untuk menilai kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap analisis kinerja keuangan serta mengimplementasikan pengetahuan akuntansi di dalam Masyarakat.

### b. Bagi Badan Usaha milik Desa (BUMDes)

Diharapkan dengan melihat hasil dari analisis kinerja keuangan untuk menilai alur kinerja keuangan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan finansial BUMDes sehingga memudahkan manajemen dalam mengelola usahanya.

### c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan untuk menilai kinerja keuangan khususnya pada Badan Usaha milik Desa (BUMDes).

